

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A PORNOGRAFI

A.1 Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu *Phornographia* yang bermakna tentang sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah lukisan yang bermuatan seksual, Salah satu yang menonjol adalah sebuah gambaran tentang tentang tempat pelacuran yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. pada saat itu orang pun bisa menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacuran disana, karena pada masa itu gambar atau tulisan tentang alat vital adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang tindakan tersebut. Jika menurut kamus besar bahasa Indonesia pornografi sendiri memiliki pengertian yaitu pengertian pertama penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan pengertian kedua bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Maka dari itu di Indonesia pornografi sangat dilarang pengedarannya seperti berbagai contoh permasalahan pornografi yang telah beredar di dalam lingkungan masyarakat yaitu:

- a. Lagu-lagu yang ber lirik mesum atau lagu-lagu yang berbunyi atau suara seksual.
- b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (*sex phone*)

- c. Jasa pelayanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (*party line*)
- d. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan sebuah artis berpakaian mini atau seolah-olah tidak memakai baju.
- e. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaian mini dan gerakan seksual dalam klip video/music di TV dan DVD
- f. Gambaran atau foto artis yang begaya sensual
- g. Iklan-iklan yang menonjolkan artis dengan gaya yang sensual biasanya ditampilkan di iklan [arum, mobil, hp, dll.
- h. Fiksi dan konflik yang menggambarkan adegan seks dengan cara sedemikian rupa sehingga membangkitkan nafsu hasrat seksual.

Makna kata porno atau pornografi itu sendiri tidak dapat didefinisikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri menjadi berbeda-beda. Banyak seniman yang merealisasikan idenya kedalam sebuah karya seni, tetapi sesuatu yang dianggap seni oleh seniman sebagai karya seni, namun bagi masyarakat bukan dianggap sebuah seni melainkan sesuatu pornografi. Inilah yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak definisi tergantung dari sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek tersebut dapat dikatakan sebagai pornografi atau tidak.

Pornografi didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memiliki banyak pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kecabulan dalam undang-undang anti pornografi dijelaskan dalam bab II, berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

- b. Kekerasan seksual
- c. Mastrubasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesampingkan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak

Dari pendapat H.B Jassin, Penulis berpendapat yang bisa dikatakan sebagai pornografi berisi setiap tulisan ataupun gambar yang sengaja digambar atau ditulis yang memiliki tujuan untuk merangsang seksual seseorang. Sehingga pornografi membuat sebuah imajinasi pembaca untuk mengarah pada daerah kelamin yang menyebabkan nafsu. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan pornografi merupakan segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan dibuat untuk merangsang seksualitas. Di Indonesia perbuatan Pornografi merupakan perbuatan yang ilegal, tapi penegakan hukumnya masih lemah sehingga interpretasinya pun tidak sama dari waktu ke waktu.

Hadirnya internet di Indonesia mengakibatkan dampak positif maupun negative banyak masyarakat mulai menggunakan internet untuk menggali informasi, jika menggunakan internet setiap orang dapat kapan saja mencari informasi yang diinginkan asalkan jaringan internet tersedia di rumahnya, jika dimanfaatkan secara benar maka internet sangatlah berguna namun jika internet itu berdampak pada maraknya penyebaran pornografi itu sendiri yang mana masih belum bisa diatasi oleh pemerintah.

A.2 Pengaturan Tentang Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi

Dalam masalah ini yaitu pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya. Upaya untuk mencegah penyebaran pornografi di Indonesia sudah ditanggapi serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. dalam undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di indonesia yang dimuat secara umum dalam pasal 4 yaitu:

- a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
2. Menyajikan secara eksplisit atau kelamin
3. Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, Suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting⁴

Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks pengumbaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, pengumbaran gerakan-gerakan erotis, serta pengumbaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan. Akibatnya, pornografi biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan perilaku

⁴ Yongky Karman, "Menyoal Politik Tubuh", Tersedia (*online*) tersedia di [www.kompas.co.id/ kompas cetak/0603/10/opini/2497595.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/10/opini/2497595.htm) diakses selasa 18 desember, 2018, 12:00

seksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya⁵.

Permasalahan tentang penyebaran konten pornografi semakin merajalela ini bukan artinya tidak diatur agar tidak semakin meluas. Namun beberapa perangkat Undang-Undang telah dibuat dan dijalankan agar pornografi yang kini telah menjadi tindak pidana tidak lagi terjadi. Beberapa pengaturan tentang pornografi dari mulai yang bersifat umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga berbentuk Undang-Undang yang berdiri sendiri seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Dalam KUHP, tindak Pidana pornografi telah dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP terdapat pula delik pornografi yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP⁶.

Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit untuk dirumuskan, karena pandangan mengenai apa yang disebut mengenai porno, cabul dan asusila itu sangat bersifat subyektif dan relatif. Meski demikian, dikarenakan

⁵ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta : Gema Insani, 2008 hal. 6

⁶ Andi Hamzah, 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, hal. 32.

pengaruh pornografi yang buruk dan luas maka harus diatur dalam delik cermat dan tegas.

Masalah pornografi adalah masalah lama yang sampai saat ini memerlukan penanggulangan KUHP yang ada sekarang telah mengatur pornografi namun belum dapat menanggulangi permasalahan tersebut hal ini terlihat dari semakin maraknya pornografi bahkan lebih memprihatinkan dan dampaknya pun semakin nyata.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi semua tindakan dapat menjadi negative maupun positif seperti halnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengunduh atau mengirim foto maupun video yang tidak semestinya seperti gambar atau video yang memiliki unsur porno, apalagi jika yang dimuat dalam foto atau video tersebut tidak terima akan hal tersebut. Maka dari itu pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi. Pengaturan tentang pornografi juga telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selain di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khusus yang mengatur tentang pornografi di internet terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1). Namun pada pasal tersebut, hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa uraian dan

penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya. Selain Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Sampai hari ini, Undang-Undang Pornografi diberlakukan, namun pada kenyataannya di masyarakat oleh aparat penegak hukum dirasa masih kurang efektif. Ini terlihat dari tidak begitu berfungsinya UU Pornografi dalam pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pornografi yang saat ini telah menjamur dan merebak luas di media dan alat komunikasi. Seperti yang telah dijelaskan diatas yang dimaksud dengan “pornografi” sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pornografi dan apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE.

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, memuat tentang ketentuan pidana terhadap pelaku penyebarluasan konten pornografi yaitu Setiap orang yang memproduksi, membuta, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Menurut Penulis sanksi yang diberikan bagi pelaku penyebarluasan konten pornografi telah begitu berat. Namun pada kenyataannya pelaku penyebarluasan konten pornografi maupun objek pornografi masih tersebar luas seolah tidak jera dengan sanksi yang begitu ketat.

Penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi sebuah perhatian serius dari Pemerintah diberbagai Negara termasuk Indonesia seperti Mengirim gambar yang tidak sepatutnya tidak diperkenankan walaupun itu atas perstejuan anantara kedua belah pihak, pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan jika sampai foto tersebut tersebar, jika sudah seperti ini yang patut disalahkan seharusnya juga bukan hanya pihak yang menyebar namun juga pihak yang telah mengirimkan foto yang tidak patut sepatutnya.

A.3 Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk memperkuat pencegahan dari penyebaran pornografi yang termasuk *cyber crime*, pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat pelaku penyebararan situs porno di media *online* maka dari itu dapat dikenakan undang-undnag ini. Maka dari itu terdapat potensi untuk penyebaran pornografi melalui media online, serta melihat dari kemajuan teknologi informasi dalam era ini telah berubah yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi. Inilah yang menimbulkan kecenderungan akan dampak negatif dan dampak yang lebih luas yang dapat merugikan pihak

pengguna teknologi informasi, maka diperlukannya suatu peraturan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi elektronik atau online, serta menjamin kepastian hukumnya. Dengan Disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2008 menjadikan bukti bahwa negara Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara lain dalam menjamin kepastian hukum di bidang hukum duni maya (*cyberspace law*).

Undang-undang ini memiliki muatan yang cukup luas dalam mengatur bagaimana pengaturan atau konsekuensi dalam melakukan cyber crime. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur berbagai perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan jika memanfaatkan internet sebagai medianya, baik itu melakukan transaksi maupun pemanfaatan informasinya lainnya. Pada Undang-Undang ini juga telah diatur berbagai ancaman hukuman bagi yang telah menyalahgunakan internet untuk sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau melakukan kejahatan yang dilakukan melalui internet.⁷

Pengaturan tentang Pornografi pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut pada Pasal 27 yaitu berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

⁷ <http://news.okezone.com/read/2008/03/28/1/95319/pencekalan-askes-situs-porno-banyak-tantangan> diakses Selasa 18 Desember, 2018, 12:00

Telah jelas bahwa Undang-Undang ITE telah melarang penyebaran konten yang berbaur asusila. Konten asusila memiliki penjabaran yang lebih umum, namun pornografi masuk di dalamnya. Sedangkan untuk sanksi bagi siapa yang melanggar pasal tersebut telah diatur pada pasal 45 yaitu berisi Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)

Dengan demikian telah diatur penyebarluasan konten Pornografi, baik pada Undang-Undang Pornografi maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. PERLINDUNGAN HUKUM

B.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Satjipto Raharjo, Penulis berpendapat Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸. Dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungannya tersebut diberikan kepada masyarakat, agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh subyek hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan dan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban maka dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum sendiri memiliki gambaran dari berfungsinya suatu fungsi hukum untuk merealisasikan tujuan-tujuan hukum, yakni seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang telah diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan peraturan hukum. bahwa setiap orang berhak mendapatkan suatu perlindungan dari hukum, tidak seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, maka dari itu karena terdapat banyak macam perlindungan hukum maka selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan suatu kejelasan, di dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih mengutamakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Yang mana berbagai rumusan masalah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sampai detik ini

telah ada perlindungan *in abstracto* terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban⁸

B.2 MACAM- MACAM PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Serta dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan yang diperoleh dari pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran terjadi serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan yang mengakibatkan mendapatka sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan, jika sudah terjadi suatu permasalahan atau telah dilakukan suatu pelanggaran yang merugikan pihak lain.

Bahwa Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

⁸ Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hlm 16-17.

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia ini masih belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan yang merugikan pihak lain atau untuk perlindungan jika hak-haknya dilanggar. Penanganannya perlindungan hukum ini dilaksanakan oleh Pengadilan. Prinsip perlindungan hukum ini yaitu tindakan pemerintah yang masih bertumpu serta bersumber dari suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, ditunjukan kepada kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yaitu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan sebagai prinsip suatu negara hukum. Jika dikaitkan dengan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusianya, pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia juga mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari suatu negara hukum.

Pengertian perlindungan jika diartikan dari isi Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa

perlindungan adalah pemenuhan suatu hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilakukan oleh pihak LPSK dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Keadilan itu dibentuk dari pemikiran yang benar, serta dilakukan secara adil dan jujur juga bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Didalam rasa keadilan dalam hukum itu harus ditegakkan menggunakan hukum yang berlaku yaitu Hukum Positif, untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai denganrealitas masyarakat untuk tercapainya masyarakat yang aman serta damai. Maka dari itu keadilan harus dicapai sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Dapat disimpulkan Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Maka menurut Penulis Penegakan hukum dan keadilan untuk merealisasikan suatu keadilan hukum dan isi hukum maka ditentukan dari keyakinan etis, serta adil tidaknya suatu perkara tersebut dengan menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka permasalahan hukum akan menjadi nyata jika para perangkat hukumnya melaksanakan semuanya dengan baik dan jujur, serta memenuhi dan menepati aturan yang telah diberlakukan sehingga tidak akan terjadi penyelewengan aturan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, dengan menggunakan kodifikasi

serta unifikasi hukum demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan hukum. maka hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Dalam pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, jujur dan tertib jika tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat penegakan hukum secara adil. Dalam penegakkannya harus terdapat kepastian hukum, kepastian hukum sendiri merupakan perlindungan *yustisiabile* yaitu merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Maka dari itu diharapkan adanya suatu kepastian hukum untuk menjadikan masyarakat akan tertib, aman dan damai. Hukum ada untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat serta kegunaan bagi masyarakat, sehingga jangan sampai hukum tersebut menimbulkan keresahan maupun merugikan bagi masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang telah mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang sejahtera. Dapat dikatakan hukum sebagai pelindung bagi setiap individu dalam keseharian, dengan perlindungan hukum yang kokoh maka telah terwujudnya tujuan hukum yang tertib, aman, tentram, sejahtera, damai, dan adil⁹.

C. Kekerasan Seksual

C.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual dari pernyataan Achie Sudiarti Luhulima yaitu pengertian kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan

⁹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 33

perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan.

Berapa literatur asing dapat ditemukan "*Sexual Violence*" yang terjemahannya adalah kejahatan atau kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas atau perkawinan yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Kejahatan seksual dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan seksual dan pelanggaran seksual.

Pelanggaran seksual dapat diartikan setiap aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa dan perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan

Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penalaran anak kemungkinan terjadinya kejahatan ini didasari dan direncanakan oleh pelaku yang korbannya adalah anak-anak.

b. Pelanggaran seksual dengan paksaan

Pelanggaran seksual dengan unsur paksaan diberi terminologi khusus yaitu perkosaan dalam delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang diantaranya harus memenuhi unsur :

- 1) Kekerasan/ ancaman kekerasan
- 2) Adanya persetubuhan dengan korban

Dari dua unsur diatas harus terbukti secara kumulatif, kegagalan membuktikan salah satu unsur akan menggugurkan tuduhan perkosaan, seksual atau kejahatan

seksual dalam terminologinya harus mempunyai ciri-ciri bahwa tindakan tersebut berupa¹⁰ :

- a. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis);
- b. Dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat);
- c. Dikehendaki/ diniati oleh pelaku;
- d. Akibat ada kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang dikehendaki oleh korban.

Dapat dirumuskan bahwa kejahatan atau kekerasan seksual adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korbannya baik secara fisik maupun psikis. Hal penting lainnya adalah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*accidental*) tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada korbannya. Kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di negara kita. Pengaturan kekerasan seksual terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana tapi, hanya didapati dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Menurut pendapat Achie Sudiarti Luhulima diuraikan beberapa unsur-unsur kekerasan seksual yaitu :

1. Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*Gender based violence*) ;
2. Yang berakibat ataupun tidak berakibat ;
3. Kesengsaraan atau penderitaan wanita ;
4. Secara Fisik, seksual atau psikologis ;
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu ;
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ;
7. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi¹¹

C.2 Pengaturan tentang Kekerasan Seksual

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.

¹¹ Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*, PT. Alumni, 2000. Jakarta, hlm 57

Pada dasarnya dapat diklasifikasikan bahwa mengenai kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Kemudian Kesusilaan sendiri telah diatur dalam Pasal 281 KUHP. Dalam pengaturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan lingkup rumah tangga tercantum pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui kekerasan seksual adalah bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan melanggar hak asasi perempuan, kekerasan seksual terhadap perempuan dapat mengakibatkan perempuan yang mengalaminya menjadi trauma. Kekerasan seksual tindak kriminal yang melecehkan perempuan dan tindak pidana ini tersembunyi jarang dilaporkan. Laki-laki mengintimidasi perempuan dengan menimbulkan kerugian fisik, mental perempuan tersebut. Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana yang menyangkut kekerasan seksual, belumlah efektif dalam mencegah dan mengendalikan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan banyak berbagai pertimbangan baik dari segi sosiologisnya seperti belum sesuai mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan kekerasan seksual, kemudian mengenai jenis sanksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap para pelaku kejahatan kekerasan seksual.¹²

D. Pengertian dan bentuk-bentuk korban

¹² Dikutip dari <http://www.berdikarionline.com/> pada tanggal 23 desember 2018, pukul 19:00 WIB.

D.1 Pengertian korban

Jika ada kejahatan maka Ada korban, kata-kata ini menyatakan apabila terjadi suatu kejahatan maka timbul korban dari kejahatan tersebut. Korban dalam suatu kejahatan mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, peranan korban disini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan korban.

Seperti pernyataan ini bahwa *“The Declaration OF Basic Principles Of Justice For Victims Of Crimes And Abuse Of Power”* tahun 1985, memberikan pengertian korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau kerugian hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan¹³.

Sedangkan Menurut pendapat Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain. Jika dari pernyataan ZP. Separovic, Pengertian korban meliputi korban kejahatan dan korban bukan kejahatan.

Sedangkan Benjamin Mendelohn¹⁴ mengemukakan pendapat bahwa dalam merumuskan pengertian korban dalam konteks viktimologi berkaitan dengan viktimitas (*victimity*), *Victimity* tidaklah sama dengan Crime, tetapi merupakan pengertian yang lebih luas daripada “korban” kejahatan, berdasarkan psikologikal

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 133

¹⁴ Arif Gosita *Op Cit* hlm 46-47

fenomenologi adalah factor-faktor yang menyebabkan orang mudah menjadi korban atau akibat bahaya yang mengancam seseorang. Lebih lanjut Mendelsohn mengemukakan Definisi evolusi viktimologi dapat dicirikan oleh keseluruhan karakteristik psikologi atau bio-psikologis, yang umum bagi semua korban pada umumnya, untuk mencegah dan melawan. Jadi masalah korban dapat dijelaskan dari evolusi suatu masyarakat yang berlangsung terus. Apakah korban benar-benar korban atau Penjahat itu bisa jadi korban karena melawan atau menjegah sesuatu perbuatan yang dapat merugikan atau bisa disebut dengan pertahanan diri.

D.2 Bentuk-bentuk korban

Menurut pendapat dari Arif Gosita masalah korban kejahatan mengemukakan berdasarkan pengertian korban diatas, maka korban terbagi menjadi :

1. Korban ganda

Korban ganda akibat tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan. Misalnya dalam peristiwa perkosaan. Korban disini akan mengalami berbagai macam mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Mereka dalam pengertian adalah perorangan atau korban individual yang disebut dengan bukan perorangan misalnya, suatu badan atau organisasi atau lembaga, pihak adalah impersonal, kolektif komersial adalah yang disebut viktimisasi sekunder. Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dan antara peristiwa-peristiwa tersebut

saling Richard Quinny berpendapat dalam tulisannya “who is the victim”, menegaskan bahwa pengertian korban jangan diterima apa adanya (taken for granted). Konsep tentang pengertian korban merupakan realitas sosial sebagai objek suatu fenomena, sebagai konstruksi sosial dari situasi tertentu, tetapi berkait dan merupakan produk dari proses-proses sosial baik dari kekuasaan pembentuk undang-undang dan para penegak hukum. penderitaan mental, fisik dan sosial sebelum proses pengadilan (sewaktu diperkosa dan pemeriksaan polisi), selama persidangan dan setelah persidangan.

2. Korban yang tidak nampak

Korban yang tidak nampak adalah korban yang sebetulnya tidak menderita tindakan kekerasan tetapi karena situasi dan kondisi tertentu yang tidak memberitahukan, melaporkan penderitanya kepada yang berwajib untuk menyelesaikan secepatnya.

3. Pelaku sebagai korban

Seorang pelaku perempuan yang melakukan suatu tindakan kekerasan dapat juga menjadi korban yang *non struktural*. Ia menjadi korban karena pembalasan atau tindak adanya peraturan atau adanya peraturan yang dapat menjadi landasan ia di perlakukan secara adil.

4. Korban kekerasan

Korban kekerasan ini merupakan perwujudan tindak kekerasan yang meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan

sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya¹⁵

mempengaruhi, pelaku kejahatan dan korban kejahatan kedudukannya sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan. Dari kejahatan tersebut akan timbul korban akibat dari kejahatan

Korban akibat kejahatan menurut Mendelsohn terbagi menjadi lima alasan yaitu :

1. Korban karena kejahatan
2. Korban karena dirinya sendiri
3. Korban yang timbul karena perilaku anti sosial
4. Korban karena penggunaan teknologi
5. Korban karena kesembronan atau kelalaian dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga mempengaruhi siklus alam, seperti musim, cuaca dan lain-lain.¹⁶

D.3 Perempuan sebagai Latent Victim

Apa yang dimaksud dengan *Latent victims*, bahwa latent victims adalah sifat karakter tertentu yang memiliki kecenderungan sebagai korban. Bisa dikatakan bahwa hubungan korban dengan kejahatan adalah sebagai akibat kejahatan tersebut dengan kata lain pihak yang menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Pendapat ini didukung dengan fakta yang ada, Ditinjau dari karakteristik korban, pada umumnya yang menjadi korban kekerasan adalah perempuan muda, berusia antara 12 sampai 18 tahun yang lebih sering menjadi korban kekerasan, yang malah dilakukan oleh kenalan, teman, atau pacar jika dibandingkan perempuan yang lebih tua, karena pada saat umur tersebut masih rentan dan juga lemah. Ada pula perempuan yang jarang berpergian seperti pergi ke tempat ibadah, serta memiliki banyak pacar, sering

15 Arif Gosita Op Cit hlm 48

16 Susilawati, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2001, hlm 13

gonta ganti pacar, dan perempuan yang sudah pernah mengalami kekerasan sebelumnya memiliki kerentanan atau karakteristik sering menjadi korban. Dan perempuan pula rentan menjadi korban kekerasan seksual, apalagi pada saat berpacaran biasanya disinilah sering wanita menjadi korban. Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual bukan hanya fisik namun juga psikis. Dampak bagi kejiwaannya dapat menjadikan Perempuan tersebut trauma kepada laki-laki. Akibatnya, perempuan menjadi takut untuk menjalin hubungan dengan laki-laki (*frigid dan vaginismus*). Ada pula dampak bagi sosialnya, akibat dari kekerasan memposisikan perempuan menjadi lemah dalam hubungan dengan laki-laki. Ada pula pada saat berpacaran diajak berhubungan intim dan ketika si perempuan tidak mau namun laki-lakinya memaksa ini sudah menjadi korban kekerasan, apalagi sampai pihak laki-lakinya main tangan atau di paksa disini perempuan pasti yang terkena imbasnya. Selain itu apabila terjadi hubungan seks dalam pacaran, perempuan yang sering rentan akan terkena Penyakit Menular Seksual (PMS)¹⁸. Bentuk dari kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu adalah kekerasan fisik, psikologis, serta seksual. Kekerasan fisik meliputi kekerasan yang akan meninggalkan bekas ditubuh korban seperti pukulan, tendangan, tamparan, sundutan rokok dan sebagainya. Sementara, kekerasan psikologis atau emosional, seperti caci maki, bentakan, kata-kata kasar, ancaman, cemburu yang berlebihan. Bukan hanya itu saja kekerasan seksual bisa berupa ucapan tidak senonoh yang berkaitan dengan seks, serta menyentuh bagian tubuh secara seksual diluar kehendak korban, sehingga memaksa melakukan hubungan seksual dengan janji-janji ataupun paksaan. Maka

dari itu perlu adanya perlindungan, yang bisa diperoleh dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perempuan yang telah menjadi korban terhadap kekerasan seksual dapat meminta bantuan hukum dengan pembelaan atau pendampingan kepada lembaga penyedia layanan (Komnas Perempuan) sesuai dengan kebutuhan korban. Pemberian bantuan hukum ini diberikan supaya menekankan tuntutan hak yang telah diak adalah adanya pembelaan atau pendampingan korban kekerasan dalam pacaran dari seorang advokat (*access to legal counsel*). Maka tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai untuk :

- a. Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-prosesinvestigasi dan penuntutan hukum denganmembuat serangkaian peraturan danprosedur yang memungkinkan merekamerasa aman secara fisik dan psikologis;
- b. Memberikan rasa aman kepada saksi dankorban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
- c. Melindungi saksi dan korban dari kekerasan ,ancaman kekerasan baik fisik maupun psikologis termasuk ancaman terhadapperekonomian saksi dan/atau korban;
- d. Mengurangi trauma yang dirasakan oleh saksi dan korban.

E. Putusan nomor 182/Pid.B/2018/PN SMN.

Dalam Putusan ini diceritakan bahwa Pada hari, jam dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, secara berturut-turut dari bulan November 2017 sampai dengan bulan januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai tahun 2018 bertempat di Gejayan Kulon Rt. 05/Rw.34, desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa telah melakukan tindak pidana pornografi sebagai berikut yaitu Pada awal tahun 2013 saksi korban masih sekolah di MAN 2 Yogyakarta telah

berkenalan dengan terdakwa Muhammad Rifa'I atau Bagong melalui handphone. Setelah beruangkali ber chatting melalui handphone saksi korban dan terdakwa sering melakukan pertemuan di sekitar sekolah saksi korban di jalan Diponegoro Yogyakarta dan jalan tamansiswa Yogyakarta.

Karena tingkat pertemuan saksi korban dan terdakwa, keduanya menganggap ada hubungan khusus. Saksi korban dan terdakwa sering melakukan kontak melalui WhatsApp dengan menggunakan beberapa nomor.

Setelahnya Terdakwa meminta kepada saksi korban agar mengirim foto bugil saksi korban dengan alasan kangen dan ingin melihat tubuh saksi korban, namun permintaan tersebut awalnya tidak dikabulkan. Kemudian terdakwa marah dan mengancam akan mencelakai salah satu anggota keluarga korban menggunakan kendaraan apabila korban tidak memenuhi permintaannya.

Ancaman terdakwa tersebut membuat korban ketakutan, kemudian korban mengambil foto atas dirinya secara bugil tanpa busana dari arah dagu sampai kaki sehingga jelas payudara dan alat kelamin (vagina) korban, kemudian foto tersebut dikirim ke nomor WA terdakwa.

Setelah menerima fot tersebut, terdakwa meminta lagi agar saksi korban mengirim foto dan video bugil saksi korban. Namun hal ini tidak dipenuhi sehingga terdakwa marah dan kembali mengancam akan menyebarkan foto saksi korban yang pernah dikirimkan kepadanya dan juga akan mencelakai keluarga korban. Korban merasa takut dan pada bulan maret 2017 korban merekam kedua payudaranya dengan durasi 20 menit lalu dikirim ke nomor WA milik terdakwa.

Terdakwa terus meminta foto dan video telanjang korban disertai dengan ancaman-ancaman.

Bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada kakak korban disertai dengan menjelek-jelekkan korban dan mengancam akan menyebarkan foto tersebut kepada banyak orang¹⁷.

Pada putusan nomor 182/Pid.B/2018/PN SMN diketahui Pelapor adalah seorang wanita bernama Mawar (nama Samaran), terlapor bernama Muhamad Rifa'I alias Bagong sebagai terdakwa. Terdakwa didakwa dengan beberapa dakwaan sebagai berikut :

1. Dakwaan pertama adalah pasal pasal 4 ayat (1) huruf d jo pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pronografi.
2. Dakwaan kedua pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Dakwaan ketiga pasal 45 B Jo pasal 29 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁷ Isi putusan nomor 182/Pid.B/2018/PN Smn., hlm. 4-5.